

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PRODUKSI

#### A. PENGERTIAN PRODUKSI

Dalam literatur ekonomi Islam, padanan kata produksi adalah ‘intaj’ ( اِنْتَاَج ) dari akar kata ‘nataja’ ( نَتَج ).<sup>1</sup> Sedangkan Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan secara syariah dan melipatgandakan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan, menopang eksistensi, serta meninggikan derajat manusia. Pemahaman ini juga terkait dengan efisiensi dalam produksi Islam lebih dikaitkan dengan penggunaan prinsip produksi yang dibenarkan syariah. Dengan kata lain, efisiensi produksi terjadi jika menggunakan prinsip-prinsip produksi sesuai syariah.<sup>2</sup>

Prinsip dasar ekonomi Islam sendiri secara garis besar dapat dikelaskan sebagai berikut:<sup>3</sup>

##### a. Kebebasan individu

Setiap manusia mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam. Karena tanpa kebebasan tersebut, setiap

---

11. <sup>1</sup> Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta, Megistra Insania Press, 2003. h.

<sup>2</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012, h. 64.

<sup>3</sup> *Ibid.*

muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban yang mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

b. Hak terhadap harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, walaupun begitu Islam memberikan batasan tertentu agar kebebasan tersebut tidak merugikan kepentingan umum.

c. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas hal wajar

Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara setiap orang, tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah luas. Sistem ekonomi Islam mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil, dan tidak berlebihan.

d. Kesamaan sosial

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi mendukung dan menggalangkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja. Selain itu, amat penting setiap individu dalam sebuah negara memiliki peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan berbagai aktivitas ekonomi.

e. Jaminan sosial.

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam, dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan

tanggung jawab utama bagi sebuah negara Islam untuk menjamin setiap warga negara, tanpa kecuali muslim maupun non muslim. Sehingga, terciptanya persamaan sepenuhnya di antara warga negara apabila kebutuhan pokoknya telah terpenuhi.

f. Distribusi kekayaan secara meluas.

Dalam hal ini, Islam mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada seluruh lapisan masyarakat.

g. Larangan menumpuk kekayaan.

Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut agar hal ini tidak terjadi pada suatu negara.

h. Kesejahteraan individu dan masyarakat.

Dalam sistem ini, Islam mengakui adanya kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, tidak saling bersaing maupun bertentangan sesama mereka. Maka dalam sistem ekonomi Islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama.

Dalam hal ini, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk memproduksi dengan menekuni aktivitas ekonomi dalam bentuk apapun. Dalam Islam sendiri menjelaskan bahwa seluruh perbuatan yang

menghasilkan benda atau pelayanan bagi manusia atau yang memberi keindahan pada mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera, bahkan Islam telah memberkati ini sebagai nilai tambah ibadah kepada Allah dan perjuangan di jalan-Nya.

Produksi dalam istilah konvensional adalah mengubah sumber-sumber dasar ke dalam barang jadi, atau proses dimana input diolah menjadi output. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia.<sup>4</sup> Produksi adalah menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Muhammad Abdul Mannan melihat produksi sebagai penciptaan guna (utility), dengan demikian meningkatkan kesejahteraan ekonomi.<sup>5</sup>

Dalam mengarahkan produksi, sistem ekonomi konvensional bergantung kepada harga yang ditentukan oleh penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) di pasar bebas. Sistem ekonomi yang bebas (*laissez faire*) bertumpu pada perusahaan-perusahaan privat. Perusahaan ini dioperasikan dan dijalankan oleh para individu serta menjadi subjek keinginan dan kehendak mereka. Tiap individu tersebut menjalankan usahanya dan memproduksi sesuai dengan hasrat dan keinginannya untuk memperoleh profit yang maksimal, hasrat inilah yang mengarahkan produksi dan aktivitas mereka. Profit menyesuaikan harga dipasar, jadi kapanpun pelaku usaha mengetahui kenaikan harga suatu komoditas, maka

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani, 1997, h.67.

<sup>5</sup> Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, terj. Suherman Rosyidi, Jakarta: Rajawali, 2010, h. 29.

mereka akan tertarik dengan memproduksi komoditas tersebut dalam skala besar guna memperoleh profit yang lebih besar.<sup>6</sup>

Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Produksi tidak hanya terbatas pada pembuatannya saja tetapi juga proses penyimpanan, distribusi, pengangkutan, pengeceran, dan pengemasan kembali atau yang lainnya.<sup>7</sup>

Menurut Heizer dan Render Produksi adalah proses penciptaan barang dan jasa. Barang dan jasa yang diproduksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan produksi membutuhkan faktor-faktor produksi seperti sumber alam, tenaga kerja, modal dan teknologi. Pada hakekatnya produksi merupakan pencipta atau penambahan bentuk, waktu dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Pengertian produksi secara luas adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan yang dapat menimbulkan kegunaan dari suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang banyak.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Baqir ash-Shadr, *Istishaduna (Buku Induk Ekonomi Islam)*, Terj. Yudi, Jakarta: Zahra, 2008, h. 447.

<sup>7</sup> Miller Meiners. *Teori Ekonomi Intennediate*. Terj. Hans Munandar. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000, h. 72.

<sup>8</sup> Jay Heizer dan Barry Render. *Manajemen Operasi*. Jakarta: Salemba, 2009, h. 55.

## B. FAKTOR PRODUKSI

Produksi menciptakan manfaat barang dimana manusia hanya mampu menciptakan, sehingga praktek ekonomi terdapat faktor-faktor produksi antara lain:

### 1. Sumber daya alam (tanah)

Islam telah mengakui tanah sebagai faktor produksi tetapi tidak setepat dalam arti sama yang digunakan di zaman modern. Dalam tulisan klasik, tanah yang dianggap sebagai faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, umpamanya permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air, mineral dan seterusnya.<sup>9</sup>

Islam memberikan terapi kepada alam sebagai salah satu faktor produksi, ia mengizinkan pemiliknya agar produksi bertambah, sebagaimana kita lihat pada usaha menghidupkan tanah mati dan waris. Hal ini dimaksudkan untuk memberi dorongan kepada seseorang dalam mengembangkan (mengelola) tanah. Islam juga membolehkan pemilik tanah dan sumber-sumber alam yang lain dan membolehkan penggunaannya untuk beraktivitas produksi, dengan syarat hak miliknya merupakan tugas sosial dan khilafah dari Allah atas milik-Nya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek..* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993, h. 55.

<sup>10</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2004, h. 224

## 2. Sumber daya manusia (Tenaga kerja).

Menurut Payaman Simanjuntak, sumber daya manusia atau *human resources* mengandung dua pengertian. Pertama, mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa.<sup>11</sup>

Pengertian kedua dari sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Kemampuan untuk bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemampuan kerja secara fisik diukur dengan usia kelompok penduduk yang termasuk dalam usia kerja disebut tenaga kerja. Secara singkat, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (*working age population*).<sup>12</sup>

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi mereka. Kekhususan pertenaga kerjaan seperti halnya kemusnahan, keadaan yang tidak terpisahkan dari tenaga kerja itu sendiri. Memang benar bahwa seorang pekerja modern memiliki tenaga kerja yang berhak dijualnya dengan harga setinggi mungkin.

---

<sup>11</sup> Payaman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: BPFEUI, 1998, h. 36.

<sup>12</sup> *Ibid*

Adam Smith mengatakan “bahwasanya tenaga kerja itulah satu-satunya faktor produksi. Karena dengan tenaga kerjanya manusia dapat merubah apa yang terdapat pada alam, dari suatu kemampuan produksi menjadi hasil-hasil pertanian serta menambah produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam industri yang merupakan sumber kekayaan bangsa.” Secara umum para ahli ekonomi sependapat bahwa tenaga kerjalah pangkal produktivitas dari semua faktor-faktor produksi yang lain. Alam maupun tanah takkan bisa menghasilkan apa-apa tanpa tenaga kerja.<sup>13</sup>

Dalam Islam tenaga kerja bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja manusia. Mereka yang mempekerjakan tenaga kerja mempunyai tanggung jawab moral dan sosial. Ukuran moral dan sosial tenaga kerja sebagai faktor produksi tidak jelas terdapat dalam ilmu ekonomi sekuler. Namun, dalam Islam tenaga kerja digunakan dalam arti yang lebih luas namun lebih terbatas. Lebih luas, karena hanya memandang pada penggunaan jasa tenaga kerja diluar batas-batas pertimbangan keuangan. Terbatas dalam arti bahwa seorang pekerja tidak secara mutlak bebas untuk berbuat apa saja yang dikehendaknya dengan tenaga kerjanya itu.<sup>14</sup>

Produktivitas kerja merupakan acuan pokok bagi pihak perusahaan dalam menentukan upah tenaga kerjanya. Peningkatan

---

<sup>13</sup> Muhammad, *Ekonomi...*,h. 225

<sup>14</sup> Mannan, *Ekonomi...*, h. 59

produktivitas faktor manusia merupakan sasaran strategis karena peningkatan faktor-faktor produksi yang lain sangat tergantung pada kemampuan tenaga manusia yang memanfaatkannya.<sup>15</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerjadapat digolongkan menjadi tiga golongan:<sup>16</sup>

- a. Kualitas dan kemampuan fisik tenaga kerja, meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, motivasi, etos kerja, dan mental.
- b. Sarana pendukung, meliputi lingkungan kerja (teknologi, cara produksi, sarana dan peralatan yang digunakan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja, dan suasana dalam lingkungan kerja itu sendiri), serta kesejahteraan karyawan yang terjamin dalam sistem pengupahan dan jaminan sosial serta jaminan kelangsungan kerja.
- c. Supra sarana, meliputi kebijakan pemerintah, hubungan industrial dan manajemen.

### C. Modal

Menurut Kamus Ekonomi, modal diartikan sebagai obyek-obyek material yang digunakan untuk memproduksi kekayaan, atau untuk menyelenggarakan jasa-jasa ekonomi. Modal merupakan salah satu dari empat faktor produksi yang dalam ilmu ekonomi biasanya dianggap perlu bagi sebuah kesatuan produktif dan usaha.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Afrida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, h. 67.

<sup>16</sup> Simanjuntak, *Pengantar ...*, h. 47.

<sup>17</sup> Haris Priyatna, *Kmaus Ekonomi Lengkap*. Jakarta: Nuansa cendikia, 2013, h. 84.

Menurut Hadiwidjaja, modal merupakan kekayaan yang digunakan dalam produksi untuk memperoleh kekayaan selanjutnya.<sup>18</sup> Modal dalam arti sempit adalah sejumlah uang atau sejumlah nilai uang yang dipergunakan dalam memenuhi semua keperluan usaha. Modal dalam pengertian umum mencakup benda-benda seperti tanah, gedung, mesin, alat-alat perkakas dan barang produktif lainnya untuk kegiatan usaha.<sup>19</sup>

Modal merupakan yang sangat penting dalam suatu produksi. Tanpa adanya modal, produsen tidak akan bisa menghasilkan suatu barang atau jasa. Dalam Islam modal harus bebas dari riba. Dalam beberapa cara perolehan modal, Islam mengatur sistem yang lebih baik, dengan cara kerja *sma mudharabah* atau *musyarakah*. Hal ini untuk menjaga hak produsen dan juga hak pemilik modal, agar tercapai suatu kebaikan dalam suatu aktivitas produksi.<sup>20</sup>

Modal dapat juga tumbuh dalam masyarakat yang bebas bunga. Janganlah lupa bahwa Islam memperbolehkan adanya laba yang berlaku sebagai insentif untuk menabung. Walaupun ada larangan akan bunga, itu tidak berarti bahwa tidak terdapat biaya modal dapat dinyatakan dari segi penggunaan-penggunaan alternatifnya. Karena itu tingkat keuntungan pada usaha ekonomi yang

---

<sup>18</sup> Hadiwijaya, *Ekonomi Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1989, h. 51.

<sup>19</sup> Sriyadi. *Bisnis Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern*. Semarang: IKIP Press, 2001, h. 17.

<sup>20</sup> Ika Yunia Fauzia, Abdul kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 120

khusus antara lain dapat digunakan sebagai salah satu sarana penentuan modal.<sup>21</sup>

Selain itu, modal merupakan sumber produksi dan sumber kebebasan dalam sistem ekonomi kapitalis. Setiap orang yang memiliki modal yang lebih besar akan menikmati hak kebebasan lebih baik untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Ketidaksamaan kesempatan mewujudkan jurang perbedaan antara golongan kaya yang semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

#### D. Organisasi

Organisasi adalah upaya sejak mulai timbulnya ide usaha dan barang apa yang ingin diproduksi, berapa, dan kualitasnya bagaimana dalam angan-angan manager, kemudian ide tersebut dipikirkannya dan dicarikan apa saja keperluan yang termasuk dalam faktor-faktor produksi sebelumnya.<sup>22</sup> Kelihatan tidak ada ciri-ciri istimewa yang dapat dianggap sebagai organisasi dalam suatu kerangka Islam. Tapi ciri-ciri khusus berikutnya dapat diperhatikan, untuk memahami peranan organisasi dalam ekonomi Islam.

Karena sifat terpadu organisasi inilah tuntutan akan integritas moral, ketetapan dan kejujuran dalam perakunan (accounting) barangkali jauh lebih diperlukan daripada dalam organisasi secular mana saja, yang para pemilik modalnya mungkin bukan merupakan bagian dari manajemen. Islam menekankan kejujuran, ketetapan, dan

---

<sup>21</sup> Mannan, *Ekonomi...*, h. 62.

<sup>22</sup> Muhammad, *Ekonomi...*, h. 228

kesungguhan dalam urusan perdagangan. Karena hal itu mengurangi biaya penyediaan dan pengawasan.<sup>23</sup>

Yang terakhir adalah bahwa faktor manusia dalam produksi dan strategi usaha barangkali mempunyai signifikansi lebih diakui dibandingkan dengan strategi manajemen lainnya yang didasarkan pada memaksimalkan keuntungan atau penjualan.<sup>24</sup>

Dalam Islam, kekayaan bukanlah tujuan utama, begitu pula pencariannya. Islam juga tidak memandang peningkatan produksi berdasarkan kekayaan total dan terpisah dari distribusi. Islam pun tidak setuju jika dikatakan bahwa masalah ekonomi timbul akibat kelangkaan produksi sehingga pemecahannya adalah peningkatan kekayaan secara keseluruhan.<sup>25</sup> Ketika Islam menjadikan pertambahan kekayaan sebagai tujuan masyarakat, maka mengkaitkannya dengan kenyamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan umum sebagai tujuan akhirnya. Islam menolak pertambahan kekayaan yang menghalangi tercapainya tujuan akhir tersebut, yang merugikan masyarakat, bukannya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

### **C. Tujuan Produksi**

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk berproduksi dengan menekuni aktivitas ekonomi dalam bentuk apapun. Dalam Islam sendiri

---

<sup>23</sup> Mannan, *Ekonomi...*, h. 63.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Baqir ash-Shadr, *Istishaduna (Buku Induk Ekonomi Islam)*, Terj. Yudi, Jakarta: Zahra, 2008, h. 423.

menjelaskan bahwa seluruh perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan bagi manusia atau yang memberi keindahan pada mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera, bahkan Islam telah memberkati ini sebagai nilai tambah ibadah kepada Allah dan perjuangan di jalan-Nya.

Setiap pemeluk agama manapun jika bersedia bekerja dan memproduksi maka Allah akan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap mereka. Mereka tidak perlu khawatir dan tidak pula bersedih karena janji Allah benar adanya. Mereka akan dijamin mendapatkan rezeki yang baik dan halal, dan mereka tidak perlu menghadapi kehidupan di akhirat jika telah banyak berbuat kebaikan di dunia.<sup>26</sup> Seperti apa yang telah disampaikan dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105:<sup>27</sup>

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيَبْئُتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

“Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S. At-Taubah [9]: 105)

Dalam bekerja, setiap individu dipastikan ingin memenuhi hajat dirinya maupun keluarganya berbuat baik kepada kerabatnya, bahkan bisa memberikan pertolongan terhadap masyarakat di sekitarnya. Semua ini

<sup>26</sup> Jafril Khalil, *Jihad Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010, h.233.

<sup>27</sup> Department Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit J-ART.

merupakan keutamaan agama dan tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan harta. Maka dari, itu memproduksi dan bekerja merupakan jalan untuk mencari harta secara syariah.<sup>28</sup>

Dalam aktifitas ekonomi, Islam menanamkan mekanisme berbasis moral spiritual untuk mengaplikasikan keadilan sosial pada setiap aktifitas ekonomi. Adanya ketidak seimbangan sebagai alasan yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Hal tersebut akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut.<sup>29</sup> Memproduksi barang atau jasa apapun membutuhkan usaha manajemen terpadu antara tenaga kerja kapital dan teknologi. Namun karena proses produksi terjadi dalam sebuah masyarakat dengan bantuan usaha manusia dan sumber daya langka, sistem produksi harus mencerminkan sebuah karakteristik jika produksi tersebut ingin dianggap efisien dan adil.<sup>30</sup>

Ini adalah fungsi dari menerjemahkan konsep moral sebagai faktor endogen (dari dalam) dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat mendasar untuk dapat mengalahkan kepentingan pribadi.

Substansi berkenaan dengan tujuan produksi dalam Islam disimpulkan dalam poin-poin dibawah ini:<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Hakim, *Prinsip...*, h. 64.

<sup>29</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007, h. 120.

<sup>30</sup> Chapra, *Islam...*, h. 41.

<sup>31</sup> Baqir ash-Shadr, *Istishaduna (Buku Induk Ekonomi Islam)*, Terj. Yudi, Jakarta: Zahra, 2008, h. 450.

1. Guna memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat, Islam mewajibkan masyarakat untuk memproduksi komoditas dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara memadai sehingga sikap individu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Bila batas minimal produksi atau kebutuhan pokok belum tercapai, maka berbagai potensi yang ada tidak diperkenankan untuk dicurahkan dalam berbagai bidang produksi lainnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan itu sendiri memerankan peran positif dalam pergerakan produksi, terlepas dari berapa besar daya beli yang menyokong kebutuhan tersebut.
2. Dalam Islam produksi masyarakat tidak boleh berlebihan. Islam melarang pemborosan dan berlebihan dalam skala individu maupun skala masyarakat, salah satu diantaranya Islam melarang masyarakat dalam hal ini produsen parfum memproduksi parfum lebih dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan melampaui kapasitas konsumsi serta perdagangan mereka. Hal ini dikarenakan surplus produksi termasuk tindakan berlebihan serta penyalahgunaan kekayaan tanpa pembenaran apapun.
3. Islam mengisinkan imam untuk mengintervensi produksi atas dasar justifikasi berikut ini<sup>32</sup>:

Pertama, agar negara bisa menjamin tercapainya batas minimal produksi komoditas pokok, dan menjamin tidak terlampauinya batas maksimal yang diizinkan. Jelas bahwa usaha-usaha privat yang

---

<sup>32</sup> Baqir ash-Shadr, *Istishaduna (Buku ...)*, h. 449.

dijalankan berdasarkan kehendak pribadi para pemiliknya tanpa ada arahan dari otoritas hukum akan memunculkan produksi masal yang berlebihan disatu sisi dan tidak tercapainya batas produksi disisi lain. Pengawasan dan otoritas hukum diperlukan guna menjamin produksi masyarakat diantara dua batas bawah dan batas atas agar tidak terjadi kelangkaan maupun pemborosan.

Kedua, guna mengisi kekosongan hukum sesuai dengan situasi dan kondisi aktual. Kepala negara (*waliyyul amr*) berhak mengisi kekosongan ini demi kepentingan umum dan demi tercapainya tujuan sistem ekonomi Islam. Baqir ash-Shadr mencoba untuk merinci kekosongan ini beserta batas-batas dan peranya dalam pembahasan. Dalam mengisi kekosongan ini, kepala negara berhak mengintervensi dan mengawasi pergerakan produksi, termasuk menetapkan dan mengarahkan batas-batasnya.

Ketiga, legislasi Islam tentang bahan-bahan mentah alami ataupun kekayaan alam memberi ruang bagi negara untuk mengintervensi dan mengawasi keseluruhan kehidupan ekonomi, karena legislasi Islam dalam hal ini menjadukan kerja langsung (*direct labour*) sebagai syarat dan dasar bagi penguasaan bahan-bahan mentah alami dan peroleh hak khusus sesuai dengan pernyataan hukum yang disebutkan dalam sejumlah suprastruktur hukum Islam. Artinya, mustahil seorang individu menjalankan proyek besar investasi dibidang kekayaan alam tanpa mencurahkan kerja langsung untuk memperoleh kerja langsung

atas kekayaan alam tersebut. Dalam hal ini otoritas hukum mengatur proses produksi bahan-bahan mentah alami dan industri pertambangan guna menciptakan usaha-usaha besar yang mampu mengeksploitasi kekayaan-kekayaan tersebut sehingga bermanfaat bagi masyarakat Islam.

Baqir ash-Shadr menjelaskan bahwa apabila negara mampu mengawasi industri mineral dan produksi bahan-bahan mentah alami, maka mereka akan memegang kendali secara tidak langsung atas berbagai cabang produksi dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dikarenakan kemungkinan besar cabang-cabang produksi tersebut tergantung pada industri mineral dan produksi bahan mentah alami. Dengan begitu, kepala negara secara tidak langsung mampu mengendalikan berbagai cabang produksi lewat pengawasan terhadap tahap dasar dan awal proses produksi, yaitu proses produksi bahan-bahan mentah alami.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid, h. 450.